



Published by Yayasan Yetti Afrida Center Bengkulu

pISSN | eISSN

Vol. 1 No. 1 Oktober 2026 | Pages 15–28

<https://yettiafridacenter.com/tautan>

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Perubahan Nilai Sosial dan Budaya dalam Masyarakat Modern: Studi tentang Pergeseran Tradisi Lokal di Tengah Arus Globalisasi

Rahmat Ramdhani

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: rahmatramdhani@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Purpose: This article examines shifts in the meaning, functions, and practices of local traditions in modern society amid globalization and develops a framework for strengthening cultural sustainability that positions communities as the primary actors.

Design/Methodology: This study adopts a qualitative literature review using thematic synthesis of theories of social change, cultural globalization, identity, hybridity, and the safeguarding of intangible cultural heritage. The analysis is not based on surveys or field observations conducted by the author.

Findings: The review shows that traditions change through shifts in intergenerational authority, the organization of social time and space, digital mediation, cultural commodification, and identity negotiation. Globalization does not necessarily eliminate traditions; rather, it can simultaneously generate adaptation, hybridization, and an erosion of meaning.

Practical Implications: Cultural preservation should strengthen community participation, intergenerational education, documentation based on informed permission, equitable benefit sharing, and cultural tourism governance that is sensitive to local values.

Originality/Value: This article proposes a Social Negotiation-Based Model of Tradition Sustainability that connects the transmission of values, adaptation of practices, community control, and evaluation of the impacts of modernization.

Keywords: social change; cultural values; local traditions; globalization; cultural identity; intangible cultural heritage

Received: 03/09/2026

Accepted: 10/09/2026

Published: 12/10/2026

A. INTRODUCTION (PENDAHULUAN)

Globalisasi telah memperluas mobilitas manusia, barang, informasi, dan simbol budaya melintasi wilayah. Transformasi ini bersinggungan dengan kehidupan lokal yang selama berabad-abad diatur oleh hubungan kekerabatan, adat, ritus, bahasa, dan pengetahuan lingkungan. Tradisi yang dahulu diwariskan terutama melalui keterlibatan langsung dalam keluarga dan komunitas kini berhadapan dengan ritme pekerjaan modern, pendidikan formal, media digital, dan orientasi ekonomi yang lebih luas. Pertemuan tersebut tidak selalu berlangsung sebagai pertentangan sederhana antara masa lalu dan masa kini, tetapi menghasilkan proses tawar-menawar mengenai apa yang perlu dipertahankan, dimodifikasi, dan ditafsirkan kembali.

Dalam kehidupan sosial, tradisi tidak terbatas pada upacara atau pertunjukan yang tampak di ruang publik. Tradisi mencakup cara mengelola hubungan dengan orang tua, kewajiban saling membantu, pengetahuan mengenai musim dan pangan, ungkapan dalam bahasa daerah, perayaan siklus hidup, serta cara suatu komunitas menilai tindakan yang dianggap patut. Geertz (1973) menekankan bahwa budaya terkait jaringan makna yang dibentuk manusia. Oleh sebab itu,

perubahan sebuah ritus dapat menunjukkan pergeseran jauh lebih luas dalam otoritas moral, jaringan sosial, dan identitas kolektif.

Kemajuan komunikasi memungkinkan generasi muda mengakses gaya hidup dan pengetahuan yang sebelumnya berada jauh dari lingkungan sosialnya. Bersamaan dengan itu, migrasi untuk kuliah atau pekerjaan dapat mengurangi intensitas keterlibatan dalam kegiatan komunal. Keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya ruang pembelajaran budaya. Sekolah, media sosial, industri hiburan, dan destinasi wisata turut menentukan tradisi mana yang ditampilkan, disukai, ataupun diabaikan. Castells (2010) menjelaskan bahwa kekuatan jaringan informasi mengubah cara hubungan sosial terorganisasi, sedangkan Appadurai (1996) menunjukkan bahwa arus budaya global bergerak melalui berbagai lanskap yang tidak selalu selaras.

Perdebatan mengenai globalisasi dan budaya sering terjebak pada dua klaim ekstrem. Pandangan pertama menganggap globalisasi secara otomatis menyeragamkan kehidupan budaya. Pandangan kedua merayakan setiap perubahan sebagai kreativitas tanpa memeriksa siapa yang kehilangan kesempatan berbicara dan memperoleh manfaat. Kedua klaim itu terlalu umum. Sebuah tradisi dapat semakin dikenal melalui teknologi, tetapi pada saat yang sama kehilangan konteks sosial; sebaliknya, pemendekan suatu upacara dapat membuat pelaksanaannya lebih inklusif tanpa menghapus nilai kebersamaan. Pengaruhnya perlu dibaca melalui dinamika lokal yang konkret (Pieterse, 2009; Robertson, 1995).

Artikel ini bertujuan menelaah mekanisme perubahan nilai sosial dan budaya, menjelaskan bentuk pergeseran tradisi lokal di tengah globalisasi, dan merumuskan prinsip keberlanjutan yang dapat digunakan untuk mengkaji praktik budaya. Pertanyaan analitisnya meliputi bagaimana tradisi mengalami perubahan fungsi, siapa yang memiliki otoritas menentukan keaslian, dan bagaimana komunitas dapat mengambil manfaat dari keterhubungan global tanpa kehilangan hak mengelola warisan budaya. Karena tidak tersedia data primer dari satu lokasi tertentu, contoh yang dibahas digunakan sebagai ilustrasi analitis, bukan temuan lapangan yang diklaim telah diobservasi.

B. LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA)

1. Perubahan Sosial, Modernitas, dan Pelembagaan Nilai

Teori modernitas memberi dasar untuk memahami mengapa nilai dan norma mengalami perubahan. Giddens (1990) menguraikan bahwa modernitas memperluas hubungan sosial melintasi ruang dan waktu, sehingga praktik setempat semakin dipengaruhi keputusan yang diambil di tempat lain. Proses ini dapat meningkatkan kebebasan individu, tetapi juga mengubah bentuk keterikatan

dengan institusi tradisional. Dalam komunitas yang sebelumnya bergantung pada jadwal pertanian, misalnya, kerja bergaji dan mobilitas harian dapat mengurangi kesempatan mengikuti kegiatan kolektif yang berlangsung sepanjang hari.

Perubahan sosial bukan sinonim kemerosotan moral. Sebagian norma kehilangan relevansi ketika kondisi material berubah, sementara sebagian lainnya dipertahankan melalui penyesuaian. Gotong royong dapat beralih dari kewajiban hadir secara fisik menjadi kontribusi tenaga, uang, atau keahlian. Namun, transformasi bentuk harus dibedakan dari penyusutan solidaritas. Apabila kontribusi baru hanya menguntungkan kelompok tertentu, ikatan sosial mungkin melemah sekalipun nama praktik lama tetap digunakan. Analisis perlu menilai fungsi dan distribusi manfaat, bukan semata kelangsungan istilah budaya.

2. Globalisasi Budaya dan Glokalisasi

Globalisasi budaya menghubungkan sirkulasi media, migrasi, barang konsumsi, dan imajinasi sosial dengan kehidupan sehari-hari. Appadurai (1996) mengingatkan bahwa arus etnis, teknologi, keuangan, media, dan ide tidak bergerak dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, budaya lokal tidak sekadar menerima paket budaya global secara utuh. Robertson (1995) menggunakan gagasan glokalisasi untuk menjelaskan bahwa proses global senantiasa diterjemahkan melalui konteks lokal. Komunitas dapat menggunakan teknologi modern untuk menyelenggarakan perayaan adat, sementara nilai setempat turut memengaruhi isi dan batas penyajian tersebut.

Perspektif hibriditas menjelaskan munculnya praktik baru dari perjumpaan berbagai tradisi. Bhabha (1994) menunjukkan pentingnya ruang negosiasi identitas yang tidak dapat disederhanakan ke satu asal yang murni. Pada kegiatan kesenian, misalnya, bentuk panggung, instrumen, atau strategi promosi dapat berubah tanpa menghilangkan seluruh pengetahuan dasar. Akan tetapi, hibridisasi bukan pembenaran bagi pengambilan unsur budaya tanpa persetujuan komunitas. Hubungan kuasa tetap menentukan siapa berhak mengubah, menamai, dan memperoleh keuntungan dari ekspresi budaya.

3. Tradisi, Keaslian, dan Warisan Budaya Takbenda

Hobsbawm dan Ranger (1983) mengingatkan bahwa sejumlah tradisi yang dianggap sangat tua dapat dibentuk atau dibakukan dalam konteks historis tertentu. Pemahaman ini mencegah romantisasi masa lalu sebagai keadaan yang sepenuhnya tetap. Namun, pernyataan bahwa tradisi berubah tidak berarti komunitas tidak memiliki hak menentukan makna praktiknya. Smith (2006)

mengkritik dominasi pendekatan warisan budaya yang hanya mengutamakan benda dan otoritas pakar, serta menekankan warisan sebagai proses sosial yang terus dinegosiasikan.

Konvensi UNESCO 2003 menempatkan komunitas, kelompok, dan individu sebagai pihak penting dalam penentuan serta perlindungan warisan budaya takbenda. Cakupannya antara lain tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial dan ritual, pengetahuan mengenai alam, dan keterampilan kerajinan tradisional. Pelindungan tidak harus berarti membekukan bentuk budaya, melainkan memastikan proses pewarisan dan kemampuan komunitas melanjutkan praktik sesuai kebutuhan mereka (UNESCO, 2003). Prinsip ini relevan ketika lembaga formal berupaya melakukan inventarisasi atau menjadikan tradisi sebagai aset pariwisata.

4. Identitas Kolektif, Representasi, dan Komodifikasi

Identitas budaya tidak hanya diwarisi, tetapi dibangun melalui narasi, ingatan, dan representasi. Hall (1997) menekankan bahwa representasi ikut menghasilkan makna sosial. Ketika tradisi dipromosikan sebagai tontonan, penyelenggara memilih simbol mana yang tampak di depan publik dan mana yang tidak ditampilkan. Seleksi tersebut dapat membantu pengenalan budaya, tetapi juga berisiko membangun gambaran tunggal mengenai komunitas yang sesungguhnya beragam.

Kraidy (2005) menjelaskan bahwa pencampuran budaya harus dianalisis bersama relasi kekuasaan dalam komunikasi global. Praktik komodifikasi menjadi persoalan ketika nilai upacara direduksi menjadi daya jual, ketika dokumentasi budaya diambil tanpa kesepakatan, atau ketika hasil ekonomi tidak kembali kepada pelaku tradisi. Di sisi lain, pemasukan dari pertunjukan dan kerajinan dapat menopang keberlanjutan keterampilan apabila komunitas memegang kendali atas narasi, jadwal, dan pembagian manfaat.

C. METHOD (METODE PENELITIAN)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka konseptual. Sumber kajian dipilih dari karya sosiologi modernitas, antropologi interpretatif, kajian globalisasi budaya, teori identitas, studi warisan budaya, dan dokumen normatif UNESCO tentang warisan budaya takbenda serta keragaman ekspresi budaya. Unit analisisnya bukan responden atau satu desa tertentu, melainkan konsep, argumen, dan temuan terpublikasi tentang relasi tradisi dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, hasilnya merupakan sintesis analitis, bukan laporan observasi atau wawancara.

Analisis ditempuh melalui tahapan identifikasi konsep, pengkodean tema, perbandingan perspektif, dan perumusan model interpretatif. Pada tahap pertama, literatur dikelompokkan berdasarkan perubahan nilai, pewarisan budaya, mobilitas, ekonomi budaya, digitalisasi, dan

otoritas komunitas. Tahap kedua menelusuri hubungan antara perubahan bentuk praktik dan perubahan maknanya. Tahap ketiga membandingkan gagasan homogenisasi, glocalisasi, dan hibriditas untuk menghindari kesimpulan deterministik. Tahap terakhir merumuskan indikator untuk menilai keberlanjutan tradisi yang dapat diuji dalam penelitian empiris.

Keabsahan argumentasi dijaga dengan penggunaan perspektif teoretis yang tidak tunggal serta perbedaan tegas antara klaim yang didukung literatur dan contoh ilustratif. Artikel ini tidak menetapkan besar pengaruh globalisasi secara statistik, tidak menggeneralisasi seluruh kebudayaan Indonesia, dan tidak menyatakan perubahan ritual tertentu tanpa bukti lokasi, periode, serta komunitas pelaksana. Batasan ini penting karena pengertian tradisi dapat berbeda menurut kelompok usia, status sosial, posisi adat, agama, dan pengalaman migrasi.

Bila model ini dikembangkan melalui penelitian lapangan, rancangan yang disarankan meliputi wawancara antargenerasi, observasi partisipatif, analisis arsip lokal, dan kajian dokumen kebijakan budaya. Pengumpulan data perlu memperoleh persetujuan partisipan, membatasi dokumentasi ritual yang tidak untuk publik, serta melibatkan komunitas dalam interpretasi hasil. Pendekatan partisipatif sejalan dengan perhatian UNESCO (2003) pada peranan pemilik dan pelaku warisan budaya.

D. RESULTS AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

1. Pergeseran Makna Tradisi dari Kewajiban Komunal ke Pilihan Identitas

Tradisi lokal sering memiliki dua dimensi yang saling terkait: tindakan yang berulang dan makna yang dilekatkan pada tindakan tersebut. Dalam masyarakat dengan ikatan komunal kuat, keterlibatan pada kegiatan adat dapat dipahami sebagai kewajiban sosial yang menegaskan keanggotaan. Modernitas memperluas ruang pilihan individu dan memungkinkan generasi muda menilai kembali bentuk keterlibatannya. Upacara yang dahulu dianggap harus dihadiri secara penuh dapat dihadapi melalui negosiasi waktu, biaya, dan alasan pekerjaan. Pergeseran ini mengubah hubungan antara hak pribadi dan tuntutan kolektif.

Namun, kesediaan untuk menegosiasikan kewajiban tidak otomatis menunjukkan penolakan identitas budaya. Individu dapat merasa sangat terikat pada asal-usulnya sekalipun tidak selalu hadir dalam kegiatan adat. Sebaliknya, partisipasi yang tampak meriah dapat menjadi tindakan seremonial tanpa pemahaman mendalam. Karena itu, analisis perlu membedakan identifikasi simbolik, pengetahuan budaya, keterlibatan praktis, dan kepedulian terhadap kelangsungan tradisi. Perbedaan ini membantu memahami mengapa jumlah peserta suatu acara belum tentu cukup untuk mengukur kekuatan nilai yang diwariskan.

Ilustrasi analitis dapat diperoleh dari praktik musyawarah kampung dan kerja bersama pada perayaan lokal. Penggunaan grup pesan untuk mengatur jadwal atau iuran bisa memudahkan koordinasi, terutama bagi warga yang bekerja di luar daerah. Akan tetapi, bila perencanaan sepenuhnya dialihkan kepada segelintir pengelola, ruang perundingan tatap muka dan kesempatan anggota lain memengaruhi keputusan mungkin menyempit. Teknologi yang sama dengan demikian dapat memperkuat atau melemahkan fungsi sosial bergantung pada distribusi wewenang.

2. Transmisi Budaya Antargenerasi

Keberlanjutan tradisi memerlukan kesempatan belajar yang tidak selalu bersifat formal. Anak mengenal cerita, bahasa, kuliner, teknik kerajinan, dan cara bersikap melalui partisipasi keseharian. Perubahan pola kerja keluarga, urbanisasi, serta dominasi materi sekolah dapat mengurangi waktu bersama yang dahulu menjadi media pendidikan kultural. Di sisi lain, pendidikan formal dapat memperluas pengetahuan mengenai budaya lokal apabila bekerja sama dengan pelaku tradisi dan tidak sekadar menjadikan adat sebagai materi hafalan.

Pewarisan yang efektif memerlukan hubungan dua arah. Generasi lebih tua memiliki pengalaman dan keterampilan kontekstual, sementara generasi muda dapat menawarkan cara dokumentasi, produksi kreatif, serta distribusi informasi baru. Ketegangan muncul apabila pihak senior memandang setiap perubahan sebagai kehilangan, atau ketika generasi muda menganggap tradisi hanya relevan jika menghasilkan konten populer. Jalan tengah memerlukan dialog mengenai nilai inti, bagian yang dapat diubah, dan unsur yang tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan.

UNESCO (2003) menempatkan transmisi antargenerasi sebagai tujuan penting pengaman warisan budaya takbenda. Pendekatan tersebut menyarankan program belajar bersama pengrajin, seniman, pemangku adat, dan keluarga, dengan ruang bagi praktik langsung. Rekaman video dan arsip daring dapat membantu mengingat teknik, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan pengalaman bersama, kepekaan terhadap situasi, dan kepercayaan yang tumbuh melalui hubungan personal.

3. Bahasa Daerah, Tuturan, dan Perubahan Ruang Komunikasi

Bahasa daerah menyimpan kategori kekerabatan, humor, nilai kesopanan, dan pengetahuan lokal. Pergeseran bahasa dalam rumah tangga atau pertemanan dapat memengaruhi cara suatu pengetahuan diwariskan. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa global dalam pendidikan, pekerjaan, dan media memperluas komunikasi lintas kelompok, tetapi dapat mengurangi kesempatan menggunakan ragam lokal tertentu. Persoalannya bukan memilih satu bahasa secara eksklusif, melainkan

memastikan keberadaan ruang aman untuk mempertahankan kemahiran dan kebanggaan berbahasa daerah.

Perubahan bahasa juga tidak selalu berupa penggantian total. Penutur dapat melakukan alih kode sesuai audiens, menyesuaikan kosakata baru, atau menciptakan format kreatif untuk konten digital. Praktik tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi. Namun, jika generasi muda hanya mengenal beberapa ungkapan simbolik tanpa mampu memahami cerita, nasihat, atau konteks penggunaannya, transmisi makna menjadi terbatas. Pemantauan keberlanjutan bahasa sebaiknya melihat penggunaan sehari-hari, kemampuan antargenerasi berkomunikasi, dan keberadaan penutur muda yang aktif.

Program budaya di sekolah dan komunitas dapat menyediakan ruang percakapan, kelas cerita rakyat, dokumentasi lisan, serta kolaborasi dengan kreator lokal. Akan tetapi, pilihan kata atau pengucapan tidak sebaiknya dikontrol secara kaku hingga menimbulkan rasa malu pada peserta didik. Ketika bahasa diposisikan sebagai sarana hubungan sosial dan ekspresi, bukan sekadar tes benar-salah, peluang tumbuhnya pewarisan akan lebih besar.

4. Ritual, Perayaan, dan Perubahan Fungsi Ruang Sosial

Perayaan kolektif menghubungkan dimensi simbolik, emosional, dan organisasi. Persiapan makanan, pengaturan tempat, undangan kerabat, serta pembagian tugas dapat menjadi sarana memperbarui hubungan. Di tengah perubahan gaya hidup, kegiatan semacam ini kerap dituntut lebih singkat, terjadwal, dan menyesuaikan sumber daya. Penyesuaian tidak perlu dinilai negatif tanpa memahami alasan pelaku. Pemendekan waktu kadang memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi, sementara penghilangan proses persiapan kolektif dapat mengurangi interaksi yang justru menjadi inti kebersamaan.

Peralihan tempat penyelenggaraan, dari halaman rumah atau ruang kampung ke gedung komersial, juga dapat mengubah struktur relasi. Layanan profesional mengurangi beban kerja keluarga, tetapi sekaligus memindahkan sebagian pengetahuan pengorganisasian kepada penyedia jasa. Analisis seharusnya menilai apakah anggota komunitas masih terlibat dalam pengambilan keputusan, pemahaman simbol, dan pembagian tanggung jawab. Keutuhan nilai tidak dapat disimpulkan hanya dari kemiripan dekorasi atau pakaian tradisional.

5. Pariwisata Budaya dan Komodifikasi Tradisi

Pariwisata dapat memperluas pasar bagi kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan, membuka ruang kerja, serta meningkatkan pengakuan atas pengetahuan setempat. Akan tetapi, pengembangan destinasi sering menuntut jadwal pertunjukan yang teratur, durasi lebih singkat, dan tampilan yang

mudah dipahami pengunjung. Akibatnya, unsur budaya dipilih berdasarkan keterjualan, bukan selalu signifikansi bagi komunitas. Smith (2006) menunjukkan bahwa warisan budaya melibatkan perebutan makna dan otoritas, sehingga desain kegiatan wisata tidak boleh dipandang sebagai keputusan teknis semata.

Komodifikasi menjadi persoalan ketika komunitas kehilangan kuasa menjelaskan praktiknya, ketika ritual terbatas dipertontonkan tanpa izin, atau ketika keuntungan terutama dinikmati perantara. Sebaliknya, kegiatan ekonomi dapat memperkuat keberlanjutan jika pelaku tradisi mengatur bentuk sajian, menerima kompensasi yang layak, dan memiliki hak menghentikan dokumentasi yang melanggar kesepakatan. Konvensi UNESCO 2005 mengenai keragaman ekspresi budaya memberikan dasar penting untuk mempertimbangkan nilai budaya selain nilai komersial.

Penelitian lapangan terhadap wisata budaya perlu memeriksa alur pendapatan, partisipasi pengrajin perempuan dan pemuda, hak atas gambar serta rekaman, dan dampaknya terhadap kalender kegiatan lokal. Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa kenaikan kunjungan. Penguatan keahlian lokal, akses komunitas pada ruang budaya, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan sumber daya juga harus masuk evaluasi.

6. Digitalisasi, Dokumentasi, dan Pergeseran Otoritas

Platform digital memungkinkan cerita, musik, dan kerajinan daerah menjangkau khalayak yang sebelumnya sulit dicapai. Arsip suara serta video dapat membantu proses pembelajaran, mempermudah diaspora menjaga hubungan dengan daerah asal, dan membuka dialog antarbudaya. Namun, dokumentasi digital sekaligus mengubah siapa yang memilih representasi. Ketika pemilik akun memperoleh perhatian lebih besar daripada para pelaku tradisi, otoritas penafsiran berpotensi bergeser dari komunitas ke kurator konten.

Tidak seluruh pengetahuan budaya layak ditempatkan di ruang publik. Sejumlah tradisi memiliki batasan akses berdasarkan peran, tahapan belajar, atau kesepakatan komunitas. Prinsip persetujuan, penghormatan terhadap konteks, dan kemungkinan menarik izin perlu menjadi bagian tata kelola dokumentasi. Upaya pelestarian yang hanya menumpuk unggahan tanpa mempertimbangkan hak pelaku berisiko menjadikan budaya sebagai sumber data yang dapat diambil dan diperjualbelikan tanpa kontrol setempat.

Strategi dokumentasi yang bertanggung jawab melibatkan pemetaan jenis materi, konsultasi dengan pelaku, penetapan siapa boleh melihat, pencatatan asal-usul, dan mekanisme berbagi manfaat. Arsip dapat memiliki lapisan akses publik, pendidikan, dan komunitas terbatas. Kualitas

proses ini sama pentingnya dengan jumlah berkas yang tersimpan. Pewarisan berlangsung melalui hubungan sosial, sedangkan arsip hanyalah salah satu infrastruktur pendukungnya.

7. Identitas Lokal dalam Pertemuan Budaya Global

Pertemuan budaya dapat memunculkan perasaan terancam ketika simbol yang selama ini menandai keanggotaan menjadi kurang terlihat. Namun identitas tidak bersifat tunggal. Seseorang dapat menjadi anggota komunitas adat, warga kota, mahasiswa, pekerja lintas daerah, dan pengguna platform global sekaligus. Hall (1997) membantu membaca identitas sebagai hasil konstruksi makna yang terus berlangsung. Kategori lokal dan global dapat hadir berdampingan, saling melengkapi, ataupun berkonflik pada situasi tertentu.

Penting membedakan keterbukaan budaya dengan hilangnya kemampuan menentukan pilihan. Mengadopsi mode atau teknologi dari luar tidak otomatis menghapus kepedulian terhadap nilai lokal. Persoalan muncul apabila proses adaptasi dipaksakan, pelaku tradisi diremehkan, atau budaya tertentu dianggap rendah dibanding standar global. Penguatan identitas karena itu memerlukan penghargaan yang memungkinkan tradisi dikritik dan diperbarui tanpa mendiskreditkan komunitas asalnya.

Hibriditas budaya mempunyai dimensi politis. Bhabha (1994) dan Kraidy (2005) menunjukkan bahwa percampuran dapat membuka ruang ekspresi baru, tetapi berlangsung dalam struktur kuasa yang tidak setara. Komunitas kecil yang kurang memiliki akses produksi dan distribusi mungkin hanya menjadi pemasok inspirasi, sementara identitas budaya mereka disederhanakan untuk konsumen luas. Karena itu, literasi budaya harus disertai kemampuan memahami kepemilikan, representasi, dan relasi ekonomi.

8. Migrasi, Diaspora, dan Jaringan Kultural

Perpindahan untuk pendidikan atau pekerjaan dapat mengurangi kehadiran anggota komunitas dalam praktik rutin, tetapi juga membentuk jaringan baru yang menopang kegiatan budaya. Diaspora dapat berkontribusi dana, memperkenalkan seni daerah, atau menyelenggarakan pertemuan ketika kembali ke kampung halaman. Dalam konteks ini, ukuran keterlibatan tidak hanya berada pada tempat tinggal, melainkan juga pada kesanggupan menjaga relasi, berbagi pengetahuan, dan terlibat dalam keputusan yang berdampak pada komunitas.

Kendati demikian, dukungan diaspora perlu memperhatikan kewenangan pelaku setempat. Seseorang yang berhasil secara ekonomi di luar daerah dapat memiliki sumber daya kuat, tetapi belum tentu memahami dinamika ritual yang berubah di komunitas asal. Keputusan budaya yang

dipandu semata oleh penyandang dana bisa menimbulkan ketimpangan baru. Mekanisme musyawarah yang memungkinkan suara pelaku sehari-hari tetap terdengar sangat penting untuk menghindari dominasi pihak yang paling terlihat.

9. Ketimpangan Sosial dalam Transformasi Tradisi

Globalisasi menyediakan kesempatan yang tidak tersebar merata. Kelompok yang memiliki akses jaringan, pendidikan, modal, dan kemampuan bahasa lebih mudah mempromosikan budayanya atau memperoleh pekerjaan baru. Sebagian pelaku tradisi, terutama yang bergantung pada keterampilan manual dengan pendapatan terbatas, mungkin tidak memiliki waktu dan perangkat untuk memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, penilaian mengenai keberhasilan modernisasi harus mempertimbangkan kelas sosial, usia, gender, dan lokasi geografis.

Kebijakan pelestarian dapat secara tidak sengaja membebani kelompok tertentu. Jika upacara hanya dianggap berhasil ketika digelar megah, keluarga berpendapatan rendah mungkin terdorong mengeluarkan biaya di luar kemampuannya. Jika festival membutuhkan kostum mahal dan promosi digital, pelaku budaya kecil dapat tersisih. Tradisi berkelanjutan justru memerlukan variasi bentuk partisipasi yang tidak memaksakan biaya, serta mekanisme dukungan kepada mereka yang memegang pengetahuan tetapi lemah secara ekonomi.

10. Matriks Mekanisme Perubahan Nilai dan Tradisi

Berbagai proses di atas dapat dirangkum melalui lima dimensi: pewarisan pengetahuan, pelaksanaan ritual, bahasa dan identitas, representasi digital, serta ekonomi budaya. Masing-masing memiliki peluang dan risiko yang perlu dinilai menurut praktik serta konteks setempat. Matriks berikut merupakan sintesis konseptual, bukan tabulasi data hasil pengukuran empiris.

Tabel 1. Pemetaan Peluang dan Risiko Pergeseran Tradisi Lokal

Dimensi	Peluang adaptasi	Risiko yang perlu dinilai
Pewarisan antargenerasi	Media belajar baru dan mentor lintas lokasi	Pengetahuan terlepas dari konteks
Ritual dan perayaan	Partisipasi lebih fleksibel	Berkurangnya musyawarah komunal
Bahasa daerah	Kreasi dan dokumentasi digital	Penurunan penggunaan sehari-hari
Ekonomi budaya	Pendapatan untuk pelaku tradisi	Komodifikasi dan ketimpangan manfaat

Identitas dan media	Visibilitas serta jejaring diaspora	Representasi tanpa persetujuan
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sumber: sintesis konseptual penulis berdasarkan Geertz (1973), Appadurai (1996), Smith (2006), dan UNESCO (2003).

11. Kerangka Keberlanjutan Tradisi Berbasis Negosiasi Sosial

Kerangka yang diajukan artikel ini terdiri dari empat unsur saling terkait: pewarisan, adaptasi, kendali komunitas, dan evaluasi dampak. Pewarisan menunjuk kelangsungan transfer keterampilan, pengetahuan, dan nilai antargenerasi. Adaptasi mencakup kemampuan mengubah format kegiatan tanpa menghilangkan tujuan sosial yang dianggap penting. Kendali komunitas berarti pelaku budaya dapat menentukan makna, batas dokumentasi, penggunaan sumber daya, serta kemitraan eksternal. Evaluasi dampak memeriksa perubahan solidaritas, akses, pekerjaan, dan keberlanjutan pengetahuan.

Empat unsur tersebut saling mengoreksi. Adaptasi tanpa pewarisan dapat menghasilkan pertunjukan yang tampak lokal tetapi terlepas dari keterampilan dasar. Pewarisan tanpa ruang adaptasi bisa menyulitkan partisipasi generasi baru. Kendali komunitas tanpa keterbukaan kepada anggota muda atau kelompok rentan berisiko mempertahankan hierarki yang tidak adil. Evaluasi dampak diperlukan untuk menguji apakah kebijakan pelestarian sungguh meningkatkan kapasitas komunitas, bukan hanya menambah angka acara.

Model ini tidak dirancang sebagai standar tunggal untuk semua tradisi. Setiap komunitas memiliki hak mendefinisikan batas perubahan dan tujuan pengamanan berdasarkan konteks historisnya. Dalam penelitian empiris, unsur pewarisan dapat dinilai melalui keberadaan mentor dan penutur muda; adaptasi melalui perubahan format yang disepakati; kendali melalui partisipasi pada keputusan; sedangkan evaluasi dampak melalui pengalaman pelaku dan distribusi manfaat.

12. Implikasi Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata

Pendidikan budaya sebaiknya mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman para pelaku tradisi. Kegiatan belajar dapat berbentuk lokakarya pembuatan kerajinan, praktik bahasa daerah, dokumentasi cerita, dan kunjungan yang dipersiapkan secara etis. Tujuannya tidak sekadar menghafal nama tradisi, tetapi memahami hubungan nilai dengan praktik. Kolaborasi sekolah dan komunitas sebaiknya memberikan imbalan layak bagi narasumber budaya agar pewarisan tidak bergantung pada kerja sukarela yang terus-menerus.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan inventaris budaya secara partisipatif dan menjaga agar publikasi data tidak melanggar norma komunitas. Pemeriksaan berkala diperlukan karena bentuk praktik berubah. Program bantuan perlu mempertimbangkan kebutuhan alat, tempat berlatih, akses

pasar yang adil, dan ruang perjumpaan lintas generasi. Keberhasilan program dinilai bukan hanya berdasarkan banyaknya festival atau jumlah dokumen, tetapi juga keberadaan kelompok penerus dan kualitas hubungan sosial.

Sektor pariwisata hendaknya membuat kesepakatan tertulis mengenai representasi, tarif, hak rekam, dan pembagian manfaat dengan komunitas. Pengelolaan yang berorientasi keberlanjutan memerlukan batas jumlah kunjungan pada ruang sensitif dan ketentuan penghormatan terhadap ritus yang tidak boleh dipertontonkan. Prinsip keragaman ekspresi budaya UNESCO (2005) relevan untuk memastikan pertimbangan ekonomi tidak meniadakan kepentingan sosial dan kebudayaan.

Pada tingkat platform dan kreator, materi digital tentang tradisi memerlukan kredit yang jelas kepada pemilik pengetahuan serta penjelasan konteks. Konten pendek dapat digunakan sebagai pintu masuk, lalu dihubungkan dengan dokumentasi yang lebih mendalam dan saluran belajar bersama pelaku asli. Praktik pengambilan konten tanpa izin atau penghilangan atribusi justru dapat memperlemah hubungan kepercayaan yang diperlukan untuk pelestarian.

13. Agenda Penelitian Empiris dan Keterbatasan Kajian

Keterbatasan utama artikel ini adalah tidak adanya penelitian primer pada tradisi tertentu. Oleh sebab itu, model yang diajukan belum dapat menentukan tradisi mana yang mengalami kemunduran, seberapa besar perubahan nilainya, atau faktor apa yang paling dominan di daerah tertentu. Penelitian lanjut perlu mengamati praktik nyata selama waktu memadai, menelaah arsip, dan membandingkan penafsiran dari generasi muda, orang tua, pelaku adat, pendidik, dan pengelola pariwisata.

Penelitian longitudinal memungkinkan pengamatan perubahan lintas periode, sedangkan etnografi membantu memahami alasan seseorang hadir atau tidak hadir dalam upacara. Studi ekonomi budaya dapat memeriksa pembagian pendapatan, sementara analisis media menelaah bagaimana unggahan digital memengaruhi representasi suatu praktik. Metode campuran juga berguna jika indikator partisipasi dapat dirancang secara hati-hati tanpa menyederhanakan makna budaya menjadi angka tunggal.

Etika penelitian memiliki peran sentral. Peneliti perlu meminta izin sebelum merekam, menjelaskan penggunaan hasil kepada pelaku, dan memberi kesempatan bagi komunitas menanggapi representasi yang berpotensi keliru. Keberagaman pandangan internal komunitas juga harus ditampilkan secara proporsional. Tidak tepat menganggap satu tokoh selalu mewakili semua anggota, terutama ketika terdapat perbedaan berdasarkan usia, gender, atau kedudukan sosial.

E. CONCLUSION (KESIMPULAN)

Perubahan nilai sosial dan budaya dalam masyarakat modern terjadi melalui proses berlapis, bukan penghapusan tradisi yang seragam. Globalisasi, urbanisasi, pendidikan, pariwisata, dan media digital dapat mengubah durasi, pelaksana, ruang, serta orientasi ekonomi praktik lokal. Dampaknya bergantung pada hubungan antara perubahan bentuk dan keberlanjutan makna. Tradisi yang disesuaikan dengan kebutuhan baru dapat mempertahankan fungsi sosialnya, sedangkan bentuk yang tampak sama belum tentu menjamin pewarisan nilai.

Sintesis artikel menunjukkan bahwa perubahan berlangsung melalui negosiasi kewajiban komunal, transmisi antargenerasi, pergeseran bahasa, reorganisasi ritual, digitalisasi, serta komodifikasi budaya. Perspektif glokalisasi dan hibriditas membantu menjelaskan kreativitas lokal, sementara kajian warisan budaya mengingatkan pentingnya hak komunitas atas makna, akses, dan pembagian manfaat. Tidak satu pun pendekatan cukup bila terlepas dari relasi kekuasaan serta ketimpangan sumber daya.

Model Keberlanjutan Tradisi Berbasis Negosiasi Sosial menawarkan empat fokus: pewarisan, adaptasi, kendali komunitas, dan evaluasi dampak. Secara praktis, pendidikan perlu menciptakan ruang belajar langsung; pengelola budaya perlu melibatkan beragam anggota komunitas; dan sektor pariwisata perlu menggunakan kesepakatan yang adil. Karena kajian ini bersifat konseptual, penelitian lapangan lintas generasi dan lintas wilayah diperlukan untuk menguji model serta memperjelas karakter perubahan dalam kebudayaan tertentu.

F. BIBLIOGRAPHY (DAFTAR PUSTAKA)

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
- Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.
- Kraidy, M. M. (2005). *Hybridity, or the cultural logic of globalization*. Temple University Press.
- Pieterse, J. N. (2009). *Globalization and culture: Global mélange* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.

- Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global modernities* (pp. 25–44). SAGE Publications.
- Sahlins, M. (1999). What is anthropological enlightenment? Some lessons of the twentieth century. *Annual Review of Anthropology*, 28, i–xxiii.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and culture*. University of Chicago Press.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. <https://ich.unesco.org/en/convention>
- UNESCO. (2005). *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. <https://www.unesco.org/creativity/en/2005-convention>
- UNESCO. (2022). *Re|shaping policies for creativity: Addressing culture as a global public good*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2019). *Culture|2030 indicators*. UNESCO.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.